



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT KERJA DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI  
DENGAN MENTERI DALAM NEGERI RI, KEPALA BADAN NASIONAL  
PENGELOLA PERBATASAN, KETUA DEWAN KEHORMATAN PEMILU RI,  
DAN PIt. KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA**

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I
Rapat ke-	: --
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari & Tanggal Rapat	: Senin, 9 September 2024
Waktu Rapat	: Pukul 10.23 s.d. 11.45 WIB.
Tempat Rapat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III Gedung Nusantara I DPR RI Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Ketua/F-PG)
Acara Rapat	: 1. Penyesuaian RKA-K/L Tahun 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI; dan 2. Penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2025
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H. (Kabag Set. Komisi II DPR RI)
Hadir	: 14 dari 48 orang Anggota dengan rincian: <b>A. ANGGOTA DPR RI</b> <b>PIMPINAN:</b> 1. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Ketua/F-PG) 2. Prof. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.H., M.IP., M.I.Kom. (Wakil Ketua/F-PDIP)  1. <b>FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN</b> 1 orang Anggota dari 11 Anggota -  2. <b>FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA</b> 1 orang Anggota dari 7 Anggota

**3. FRAKSI PARTAI GERINDRA**

3 orang Anggota dari 7 Anggota

1. Prasetyo Hadi
2. Heri Gunawan, S.E.
3. Drs. Difriadi

**4. FRAKSI PARTAI NASDEM**

1 orang Anggota dari 5 Anggota

1. Aminurokhman, S.E., M.M.

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

0 orang Anggota dari 4 Anggota

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**

4 orang Anggota dari 5 Anggota

1. Rezka Oktoberia, S.H.
2. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.
3. H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M.
4. H. Mohammad Muraz, M.M.

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

2 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Teddy Setiadi, S.I.Kom
2. Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**

1 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN  
PEMBANGUNAN**

1 orang Anggota dari 2 Anggota

1. Dra. Hj. Munawaroh

**B. UNDANGAN**

1. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI  
(Komjen. Pol. Drs. Tomsitohir, M.Si);
2. Plh. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan  
(Irjen Pol. Makhruzi Rahman, S.I.K., M.H.);
3. Ketua Dewan Kehormatan Pemilu RI  
(Heddy Lugito);
4. Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara  
(Raja Juli Antoni, Ph.D.); dan
5. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
(Dr. Hadi Prabowo, M.M.);

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II/F-PG):**

Kita mulai, ya.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat pagi,

Salam sejahtera buat kita semua,

**Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili  
berserta seluruh jajaran,**

**Yang terhormat Saudara Kepala BNPP atau yang mewakili berserta  
seluruh jajaran,**

**Yang terhormat Saudara Ketua DKPP beserta seluruh jajaran,**

**Yang terhormat Saudara Plt. Kepala OIKN yang pada hari ini diwakilkan  
oleh Plt. Wakil Kepala OIKN beserta seluruh jajaran,**

**Yang terhormat kepada seluruh Pimpinan Anggota Komisi II DPR RI.**

Pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* karena kehendak-Nya dan hidayah bagi kita semua sehingga kita pada hari ini masih dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita secara konstitusional khususnya di bidang anggaran dalam keadaan sehat *walafiat*.

Sesuai dengan laporan sekretariat, rapat hari ini sudah dihadiri minimal seluruh perwakilan fraksi dari semua fraksi yang ada. Oleh karena itu, saya bisa menyatakan bahwa forum ini telah melalui kuorum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI dan untuk itu perkenankanlah saya membuka rapat ini dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.23 WIB)**

Sebelum kita lakukan, saya tentu mengucapkan terima kasih kepada seluruh, seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini. Jadi, saya juga akan membacakan surat, enggak usah dibacakan lah, Surat Undangan Menteri Dalam Negeri itu berhalangan hadir karena mendampingi Pak Presiden untuk membuka acara PON di Aceh. Jadi, pada hari ini diwakili oleh Plt. Sekjen Kemendagri.

Karena Pak Wamennya juga ada acara, ya?

Di Papua sebagai calon Gubernur. Jadi, ini informasi saja, ya, kenapa enggak datang.

Sementara Plt. Kepala Otorita IKN juga dalam waktu yang sama sedang menghadiri Rapat Kerja di Komisi V. Jadi, diwakili oleh Bapak Plt. Wakil Kepala OIKN.

**Bapak/Ibu sekalian,**

Sesuai dengan jadwal atau siklus anggaran yang dibuat oleh Badan Anggaran DPR RI, kita dalam beberapa minggu terakhir ini melakukan rapat-rapat bersama dengan mitra kerja dan dua hari ke depan ini, Senin-Selasa, saya kira kita sudah sampai pada tahap akhir pembahasan tentang pembahasan anggaran yang terkait dengan RKA-K/L RAPBN Tahun 2025 masing-masing kementerian dan lembaga.

Setelah kita melaksanakan konsinyering kemarin, saya kira mulai dari hari ini sampai besok, kita akan *me-review*-nya kembali dan kemudian bisa langsung menetapkan kesepakatan tentang anggaran tahun 2025.

Jadi tidak terasa, Bapak/Ibu sekalian, ini sudah lima hari kita membahas masalah anggaran di Komisi II ini. Dan empat kemarin sebelumnya, seperti biasanya Komisi II tidak ada niat macam-macamnya karena juga enggak ada yang perlu bermacam-macam. *Nah*, apalagi kalau misalnya di ujung begini ini pasti lebih tidak macam-macam lagi.

*Nah*, oleh karena itu, menurut saya rapat kita ini tidak perlu terlalu lama. Kita juga sudah melakukan konsinyering kemarin. Jadi, nanti kami persilakan masing-masing mitra menyampaikannya secara singkat saja, tidak usah terlalu detail lagi, kan *toh* kita sudah bahas kemarin secara mendalam di rapat konsinyering.

*Nah*, oleh karena itu, seperti biasanya, saya minta persetujuan kepada peserta rapat bahwa agenda kita pada hari ini khusus tentang soal Penyesuaian RKA-K/L Tahun 2025 dan Penetapan RAPBN Tahun 2025.

Setuju ya, Bapak-ibu sekalian?

**(RAPAT: SETUJU)**

Kemudian waktunya, ya paling lama sampai jam 12.00 lah, ya? Syukur-syukur bisa lebih cepat, seperti biasa kalau kurang kita tambah.

Setuju, ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

Baik.

Selanjutnya kami persilakan Saudara Menteri Dalam Negeri atau yang pada hari ini diwakili oleh Plt. Sekjen Kemendagri untuk menyampaikan penjelasannya.

Kami persilakan, Pak.

**Plt. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI  
(KOMJEN. POL. Drs. TOMSI TOHIR, M.Si.):**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semua,

*Om swastiastu,*

*Nama buddhaya,*

Salam kebajikan,

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, serta  
Seluruh Hadirin yang saya hormati,**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir di sini bersama-sama dalam rapat dengar pendapat.

**Para Hadirin yang saya hormati,**

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, tadi sudah dijelaskan bahwa Bapak Menteri Dalam Negeri ada kegiatan sehingga diwakilkan kepada saya.

Mohon izin untuk menyampaikan arah kebijakan Kementerian Dalam Negeri tahun 2025 sebagai berikut:

1. Yang pertama, berkaitan dengan pemantapan demokrasi dan stabilitas politik di dalam negeri, trantibumlinmas dan pengawasan pemerintah daerah; berikutnya
2. Penguatan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah;
3. Pemantapan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dan desa;
4. Penguatan implementasi digitalisasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta;
5. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah dalam negeri, reformasi birokrasi, dan pemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan pemerintahan dalam negeri.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,**

Pagu Anggaran dan Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan, ditetapkan total pagu anggaran sebesar 4,78 triliun. Dari 4,78 triliun tersebut, meliputi:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar 2,03 triliun; berikutnya
2. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Desa sebesar 471,03 miliar;
3. Program Tata Kelola Kependudukan sebesar 2,11 triliun; serta
4. Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum sebesar 155,86 miliar.

Adapun komposisi Pagu Anggaran Berdasarkan Belanja dengan rincian:

1. Belanja Operasional 1,47 triliun terdiri dari:
  - a. Belanja Pegawai 845,96 miliar; serta
  - b. Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebesar 631,81 miliar.
2. Selain itu, terdapat belanja non operasional sebesar 3,3 triliun.

Berdasarkan sumber pendaan dengan rincian:

1. Rupiah murni, 3,21 triliun;
2. Pinjaman luar negeri sebesar 1,51 triliun.

Sehingga total pagu anggaran tersebut sebesar 4,78 triliun.

Rencana Kerja dan Anggaran Kemendagri per-unit kerja Eselon 1 tahun 2025 dapat kami jelaskan bahwa:

1. Sekretariat Jenderal dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP sebesar 542,41 miliar. Termasuk di dalamnya pagu DKPP sebesar 89,27 miliar;
2. Inspektorat Jenderal 84,40 miliar;
3. Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum 226,40 miliar;
4. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan 226,47 miliar;
5. Ditjen Bina Pemdes 151,09 miliar;
6. Ditjen Bangda 223,28 miliar;
7. Ditjen Otda 99,13 miliar;
8. Ditjen Bina Keuangan Daerah 110,29 miliar;
9. Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil 2,22 triliun;
10. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri 58,6 miliar;
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 220,8 miliar; serta
12. IPDN 618,28 miliar.

**Bapak/Ibu yang saya hormati,**

Berkaitan dengan Rencana Kerja dan Target Tahun 2025, dapat kami jelaskan juga terdapat:

1. Pagu Anggaran BNPP Tahun 2025 sebesar 267,13 miliar.
2. Rencana Kerja, Kinerja Program Dukungan Manajemen dengan pagu 233,63 miliar; serta
3. Rencana Target Kinerja Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebesar 33,5 miliar.

**Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang saya hormati,**

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan pada rapat kerja dan rapat dengan pendapat pada hari ini. Kiranya uraian tersebut dapat memberikan gambaran singkat terkait pagu anggaran dan rencana kerja dan anggaran lingkup Kemendagri dan BNPP.

Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan, dan pertolongan kepada kita semua dalam rangka mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai.

Sekian dan terima kasih.

*Wabillahi taufik wal hidayah.*

*Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II/F-PG):**

*Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih, Pak.

Selanjutnya dipersilakan yang mewakili Kepala BNPP.

Sudah sekalian tadi, ya? Oke.

Kemudian, kami persilakan Ketua DKPP.

**KETUA DEWAN KEHORMATAN PEMILU RI (HEDDY LUGITO):**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera buat kita semua,

*Om swastiastu,*

*Namo buddhaya,*

Salam kebajikan,

**Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Komisi II DPR RI dan seluruh  
Anggota Komisi II DPR RI,**

**Yang saya hormati jajaran Kementerian Dalam Negeri yang dalam hal ini  
diwakili oleh Bapak Plt. Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri,**

**Yang saya hormati Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara,**

**Ibu Wamen beserta jajaran,**

**Hadirin sekalian,**

Kami meng-*hatur*-kan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada DKPP dan akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.

Selanjutnya, kami sampaikan untuk menyingkat waktu, yang terkait dengan Pagu Anggaran DKPP Tahun 2025. Berdasarkan Nota Dinas Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.2 dan seterusnya tanggal 8 Agustus 2024, penetapan Pagu Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2025 disampaikan bahwa pagu anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Tahun 2025 sebesar Rp89.271.812.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

1. Belanja Operasional sebesar 24% atau Rp21.913.581.000,00 terdiri dari:
  - a. Belanja Pegawai sebesar 10%, yakni sebesar Rp8.970.857.000,00;
  - b. Belanja Pelayanan dan Perkantoran sebesar 14%, yakni sekitar Rp12.940.724.000,00.
2. Yang kedua, Belanja Barang sebesar 68% dengan angka rupiahnya mencapai Rp61.177.231.000,00.
3. Belanja modal sebesar 6% atau sekitar 600 atau kalau dirupiahkan menjadi Rp6.181.000.000,00.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan juga Anggota Komisi II DPR RI, serta Bapak Menteri Dalam Negeri yang sudah mendukung kenaikan anggaran DKPP tahun 2025 yang kenaikannya mencapai 31% yang sebelumnya 61, saya ulangi, yang sebelumnya Rp67.532.578.000,00 menjadi Rp89.271.812.000,00. Jadi, naik 32%. Terima kasih, Pimpinan.

**Bapak/Ibu Pimpinan, dan  
Bapak Ibu Anggota Komisi II DPR RI,**

Selanjutnya, kami laporkan untuk tahun 2025, DKPP telah menyusun rencana kerja dengan rencana kerja dan rencana kegiatan sebagai tindak lanjut atas pagu anggaran yang telah diberikan kepada DKPP sebagai berikut:

1. DKPP akan menyusun Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2025 dengan target 76 lembaga.  
Jadi, Indeks Kepatuhan Etik ini perlu kami susun dan kami buat mengingat tingkat pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu semakin hari tidak semakin berkurang, justru semakin meningkat. Oleh karena itu, kami perlu melakukan mitigasi dengan mengukur tingkat kepatuhan etik terhadap penyelenggara Pemilu. Gunanya ke depan kami untuk melakukan mitigasi sekaligus pencegahan agar minimal berkurang pelanggaran etiknya nanti di Pemilu 2029, minimal berkurang. Kalau hilang sama sekali, saya kira hampir tidak mungkin;
2. Yang kedua, Inisiasi dan Konsolidasi Kerja Sama dengan Penggiat Pemilu, Kementerian/Lembaga, dan *Stakeholder* Lainnya dengan target satu laporan;
3. Fasilitasi Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Pemilu, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan target satu laporan;
4. Fasilitasi Persidangan Dugaan Pelanggaran Pemi, Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan target 300 perkara sidang.

Ini kayaknya terlalu optimis kalau 300 perkara karena tahun ini saja selama delapan bulan pengaduan yang masuk sudah 469 perkara, delapan bulan. Tahun depan cuma ditargetkan 300 kayaknya Pak Sekjen, terlalu optimis. Optimis maksudnya tidak ada pelanggaran. Padahal kalau saya hitung secara perkiraan prediksi saya, kira-kira dua kali lipat dibanding pelanggaran di saat Pileg dan Pilpres.



Kalau sekarang 470, ya nanti sekitar 900, sementara cuma dianggarkan 300, ini agak, agak mengkhawatirkan bagi saya. Semoga nanti Pak Sekjen segera menambahkan anggaran dari di dalam sendiri.

Dan seterusnya biar tidak memperpanjang, saya kira nanti lengkapnya bisa dibaca. Yang lebih penting lagi, DKPP juga sekarang ada layanan *call center* bagi publik sehingga bisa lebih cepat melakukan pengaduan.

Juga dalam rangka memantau perjalanan perkara, kami sudah memiliki *Monitoring Dashboard* sehingga perkara ini sampai di mana, sampai di mana, sampai apa, kami bisa melakukan *monitoring*, hanya perlu disempurnakan.

Dan satu lagi, ke depan juga DKPP akan mengembangkan, paling tidak mengoptimalkan pemanfaatan yang namanya aplikasi SIETIK. Sebenarnya SIETIK ini disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, tapi belum bisa kita operasionalkan karena memang tingkat reabilitasnya masih sangat rendah. Jadi, harus kami lakukan, apa namanya, optimalisasi-optimalisasi sehingga bisa dipakai karena kalau kami lepas sama sekali nanti malah mengecewakan masyarakat, "Katanya ada SIETIK malah enggak etik ini, karena lama, lama direspons." Jadi, kira-kira seperti itu.

Yang lainnya lagi, juga sosialisasi. Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang selama ini kami selalu *numpang* kegiatannya di KPU dan Bawaslu. Ke depan, diharapkan DKPP bisa punya anggaran sendiri untuk melakukan sosialisasi sendiri yang lebih masif, sampai minimal di tingkat kabupaten/kota.

Dan ke depan lagi, bisa kita lakukan ke penyelenggara *ad hoc* nanti kalau menjelang Pemilu 2029. Karena sebenarnya pelanggaran-pelanggaran etik, bahkan pelanggaran-pelanggaran hukum, penyelenggaraan administratif, lebih banyak dilakukan oleh penyelenggara-penyelenggara *ad hoc*, tapi itu yang belum disentuh oleh DKPP.

Saya kira Bapak/Ibu sekalian sudah sangat paham bagaimana perilaku PPK, Panwascam itu yang membuat gelisah Bapak/Ibu semua, terutama para caleg kemarin yang mencalonkan diri. Salah satu di antaranya karena mereka tidak diberi bekal yang cukup untuk bekerja sehingga kadang-kadang lebih banyak melakukan manuver-manuver di lapangan dan mengembangkan kreativitasnya sendiri sebagai penyelenggara pemilu. Itu yang harusnya tidak boleh lagi terjadi nanti di Pemilu 2029.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada rapat kerja dan rapat dengan pendapat hari ini. Kiranya uraian tersebut dapat memberikan gambaran singkat mengenai penyusunan RKA Tahun 2025 sesuai dengan hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan penetapan pagu anggaran, Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2025.

Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam hal mengawal demokrasi di republik ini.

Terakhir, *wabillahi taufik walhidayah.*

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II/F-PG):**

*Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih, Saudara Ketua DKPP.

Selanjutnya kami persilakan, Saudara Pelaksana Tugas Wakil Kepala OIKN.

**Plt. WAKIL KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA (RAJA JULI  
ANTONI, Ph.D.):**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semua,

*Shalom,*

*Om swastiastu,*

*Namo buddhaya,*

Salam kebajikan,

Salam sehat,

Salam Nusantara,

**Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI,  
Yang kami hormati Bapak/Ibu seluruh Anggota Komisi II DPR RI,  
Yang kami hormati Bapak Menteri Dalam Negeri dalam hal ini diwakili oleh  
Plt. Sekjen Bapak Komjenpol Tomsu Tohir,  
Yang saya hormati Bapak Ketua DKPP Bapak Heddy Lugito dan,  
Yang saya hormati Kepala BNPP atau yang mewakili,**

Hari ini tanggal 9 September 2024, saya Raja Juli Antoni, Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, menyampaikan salam hormat sekaligus permohonan maaf dari Bapak Dr. Ir. H. Mochamad Basuki Hadimoeljono Pelaksana Tugas Kepala OIKN karena pada saat yang hampir sama beliau mesti menghadiri Rapat Kerja di Komisi V dalam kapasitas beliau sebagai Menteri PUPR.

Kami menghormati, tanpa mengurangi rasa hormat, hari ini saya hadir *full team* dengan Pak Sekretaris, semua Deputi yang nanti kalau ada yang perlu didiskusikan lebih detail, kita bisa, bisa diskusikan lebih lanjut.

Sesuai arahan dari Pimpinan, saya langsung masuk ke bab tentang anggaran.

Pagu Indikatif Otorita IKN berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas pada tanggal 5 April 2024 ditetapkan sebesar Rp505,5 miliar.

Kemudian, berdasarkan pagu indikatif ini, kami telah melakukan pertemuan tiga pihak dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk menyusun Rencana Kerja 2025. Untuk memenuhi kebutuhan anggaran 2025, pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI pada tanggal 10 Juni 2024, semula kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp29,8 triliun. Usulan ini dicatat dan mendapat persetujuan Anggota Komisi II DPR RI, namun usulan ini tidak tertampung pada alokasi anggaran OIKN 2025 yang ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2024.

Besar pagu anggaran OIKN tidak mengalami perubahan dibandingkan pagu indikatif sebelumnya. Pada tanggal 5 Agustus 2025, kami melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan anggaran dengan Kementerian PUPR untuk memastikan bahwa tidak ada kegiatan pembangunan yang tumpang tindih di antara, antara OIKN dan Kementerian PUPR.

Kami melakukan penajaman usulan tambahan anggaran menjadi 27,8 triliun dan kemudian mengajukan kembali revisi usulan tambahan anggaran tersebut kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas. Usulan ini kemudian kami sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI pada tanggal 2 September 2024 yang lalu dan telah diterima dan disetujui oleh Anggota Komisi II DPR RI.

#### **Bapak/Ibu Anggota Komisi II yang kami hormati,**

Total usulan tambahan anggaran tahun 2025 seperti yang disampaikan tadi, yaitu 27,8 triliun, merupakan usulan dari enam kedeputian:

1. Kedepujian Bidang Perencanaan dan Pertanahan sebesar Rp788,5 miliar;
2. Kedepujian Bidang Pengendalian Pembangunan sebesar Rp106,1 miliar;
3. Kedepujian Bidang Sosial dan Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp62,5 miliar;
4. Kedepujian Bidang Transformasi Hijau dan Digital sebesar Rp37,7 miliar;
5. Kedepujian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebesar Rp63 miliar; dan
6. Terakhir, usulan yang paling besar dari Kedepujian Bidang Sarana dan Prasarana sebesar Rp26,27 triliun.

Secara total, kebutuhan anggaran OIKN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp28,3 triliun.

*Slide* menunjukkan detail masing-masing kedeputian, namun secara spesifik saya akan menyampaikan tentang usulan anggaran dari Kedepujian Bidang Sarana dan Prasarana. Ini yang paling signifikan sebesar 26,7 triliun

akan digunakan untuk melengkapi ekosistem terbangun tahun 2024-2025. Kegiatan yang diusulkan antara lain:

1. Pembangunan jalan dan MUT di KPP;
2. Hunian ASN;
3. Infrastruktur dasar lainnya seperti air minum, pembuangan sampah limbah;
4. Gedung kantor OIKN; serta
5. Lain sebagainya.

Setelah itu, usulan tambahan akan digunakan untuk pengelolaan gedung, kawasan, gedung, kawasan, serta pengelolaan sarana dan prasarana dasar yang sudah terbangun di IKN seperti hunian pekerja konstruksi, hunian ASN, rumah MBR, rumah Tapak Jabatan Menteri, dan lain sebagainya.

**Bapak/Ibu yang saya hormati,**

Izinkan terakhir saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama kepada Rekan-rekan dari PUPR yang bekerja tanpa lelah, Bapak/Ibu dari ATR/BPN dan KLHK yang telah menyediakan lahan serta K/L lain sebagainya, *wabil khusus* kepada Bapak Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang telah terus memberikan dukungan politik dan politik anggaran kepada OIKN.

Berkat dukungan tersebut, *alhamdulillah* Puji Tuhan, salah satu *milestone* penting dalam pembangunan IKN yaitu pelaksanaan Upacara Bendera Peringatan Kemerdekaan RI yang ke-79 berjalan dengan lancar, penuh khidmat, dan tentu saja menggembirakan. Pada akhirnya, setelah 79 tahun kita merdeka, kita bisa melaksanakan upacara bendera di istana negara yang didirikan oleh anak bangsa sendiri. Kesuksesan acara ini tentu memotivasi sekaligus meningkatkan optimisme kita semua untuk terus bekerja keras melanjutkan dan menuntaskan pembangunan IKN.

Sekali lagi, terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan kerja sama dan dukungan dari Bapak/Ibu sekalian Anggota Komisi II.

Saya akhiri dengan *billahi taufik wal hidayah*.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II/F-PG):**

*Walaikumsalam warahmatullah.*

Terima kasih, Saudara Wakil Kepala Otorita IKN.

**Bapak/Ibu sekalian,**

Selanjutnya, tentu saya akan persilakan Bapak/Ibu Pimpinan Anggota Komisi II DPR RI untuk memberikan tanggapan. Mungkin tanggapannya

enggak banyak lagi karena sudah terlalu banyak disampaikan pada saat konsinyering.

Kami persilakan.

Enggak ada, kan?

Oh ada Pak Mardani.

Enggak ada?

Oh ya, Ibu. Ya silakan.

Ibu Munawaroh, baru Pak Mardani.

**F-PPP (Dra. Hj. MUNAWAROH):**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Pimpinan dan Anggota Komisi II,  
Para Mitra yang kami hormati,**

Yang pertama, saya akan menanggapi kaitannya dengan dari DKPP. Seperti diinformasikan bahwa untuk Pemilu dan Pilpres kemarin saja itu pelanggaran etiknya ada, apa, kasusnya ada 400-an?

*Nah*, sekarang dengan Pemilu serentak, Pilkada serentak ini, akan, kemungkinan akan terjadi pelanggarannya itu kan lebih banyak kira-kiranya, tapi ini baru memang hanya 300, sehingga ini dari yang kemarin saja ini lebih rendah, apalagi nanti pada pelaksanaan Pilkada serentak. Itu pasti akan memunculkan pelanggaran-pelanggaran, kemungkinan itu lebih banyak lagi, logikanya demikian.

Sehingga mungkin perlu dipertimbangkan untuk terkait dengan anggaran untuk ini yang berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik. Kalau enggak, ya kita rekomendasikan nanti dalam, pada Anggota Dewan yang baru nanti dalam perubahan, tapi setidaknya ini kan nanti mungkin akan terjadi kan mulai November sampai berikutnya, begitu, sehingga perlu dipersiapkan lebih awal, begitu.

Kemudian, yang dari ini mungkin tidak terkait dengan anggaran yang kaitan dengan IPDN. Kita mungkin klarifikasi saja karena ada kiriman ke kita yang di Komisi II itu terkait dengan seleksi penerimaan di IPDN, begitu, sehingga ada informasi itu. Mohon nanti diklarifikasi sehingga masyarakat akan tahu duduk perkara yang sebenarnya. Saya kira itu.

Kemudian dari OIKN ini, mungkin hanya ini saja, apa, memang kemarin sudah terlaksana, apa, upacara 17 Agustus dan itu ternyata Komisi II

Anggotanya yang dulu pernah dijanjikan mau diundang ternyata mungkin hanya Pimpinan saja, dari Anggotanya tidak jadi ke sana sehingga Anggota Komisi II tidak semua bisa melihat kondisi nyata yang ada di OIKN, meskipun kita yang menyetujui anggarannya.

Saya kira itu dari saya. Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II/F-PG):**

*Waalaikumsalam warahmatullah.*

Terima kasih, Ibu Munawaroh.

Pak Mardani.

**F-PKS (Dr. H. MARDANI ALI SERA, M.Eng.):**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

*Alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ama ba'du.*

Selamat pagi dan Salam sejahtera untuk Pimpinan, Anggota, dan Mitra Komisi II yang hadir,

Karena ini adalah anggaran di tahun terakhir periode ini, periode depan mungkin kami tidak di Komisi II. Sebagian mungkin memang tidak di DPR.

Belum tahu, Pak Ketua.

Ada yang sudah ke Italia itu.

Titip beberapa hal. Pertama untuk Kemendagri, kita tahu bahwa perubahan di masyarakat demikian luar biasa, ya. Suka ada *no just, no viral no justice*, begitu. Padahal kalau pelayanan kita prima, maka enggak perlu viral, tapi semuanya berjalan dengan baik.

Kementerian Dalam Negeri salah satu Kementerian utama, saya menitipkan saja mulai dari teman-teman di Kemendagri, di IPDN, betapa bahwa membangun sistem pemerintahan daerah yang solid, yang melayani dengan hati yang terus mengembangkan kapasitas adalah sebuah keniscayaan.

Saya ingat ada satu buku *A Hundred Years Marathon Between China and US*. Jadi, Cina itu menyiapkan lebih dari 100 tahun birokratnya untuk bisa bersaing dengan Amerika. Kebetulan teman-teman Kemendagri, kami juga

mitranya PANRB, BKN, LAN ya, salah satu yang mengurus tentang *brandware* sama *software*-nya birokrasi termasuk IPDN.

Kami ke IPDN bangga, Pak, karena IPDN salah satu pengikat dari NKRI kita, seluruh suku, seluruh etnis, seluruh agama, ada di IPDN. Karena itu pendidikan karakter, ya, pendidikan spiritual, pendidikan kebangsaan mesti betul-betul kita jaga.

Tidak besar anggaran Kemendagri, kami selalu mengusulkan ada tambahan tetapi saya juga melihat memang keterbatasan tapi mudah-mudahan di tengah keterbatasan itu teman-teman Kemendagri tetap bisa memikul beban sebagai penjaga NKRI, sebagai yang menjaga kedaulatan NKRI, luar biasa 5,5 juta km<sup>2</sup>. Luas wilayah kita kalau diproyeksikan seluruh Eropa Barat itu dari Moskow sampai Istanbul ketutup, begitu, tapi 65%-nya lautan, yang daratan cuma 35%, itu pun dicacah jadi 17.000 pulau, jadi luar biasa.

Tetapi saya yakin satu orang yang di Natuna, satu orang pegawai Kemendagri yang di Pulau Rote itu mahal sekali karena itu, izin Pimpinan dan Anggota, ke depan mungkin kita perlu mengusulkan sudah ada insentif untuk mereka yang di terdepan, terluar, bahkan mungkin di daerah-daerah paling berat, tetapi mungkin kita perlu lebih memperhatikan. Suka ada *award* dari Kemendagri untuk, apa namanya, Walikota. Sekarang banyak kan juga *award* dan hadiah untuk pekerja-pekerja yang di bawah, yang di perbatasan, yang punya inovasi.

Kami pernah diajak oleh BNPP ke Belu, sampai masuk ke daerah Timur, begitu loh, dan itu luar biasa bagus sekali, begitu. Dan saya pikir perlu lebih banyak kita perhatian ke daerah-daerah. Bukan ke atas, bukan ke pusat, tapi ke daerah.

Itu titipan buat Kemendagri. Mudah-mudahan dengan ini, Kemendagri dapat terus maju dan jaya.

Untuk Otorita IKN, izin. Pertama kali dalam sejarah ini Pimpinan dan Anggota, ada rekor Mitra Komisi II yang anggarannya di atas 10 triliun, usulannya. Kami mendukung tetapi tentu perlu sangat dijaga akuntabilitasnya, sustainabilitasnya.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah karena konsepnya *city in the forest*, begitu loh. Betul-betul keasrian dan keaslian baik kondisi alam, masyarakat, masyarakat adat, betul-betul dijaga. Kita bisa menyatukan antara modernitas dengan tradisionalitas kita. Kita tetap bisa menjaga ekologi dengan dan topografi kita sehingga betul-betul IKN yang dua kali kita revisi undang-undangnya, ya, dalam dua tahun, itu betul-betul bisa menjadi contoh bagaimana IKN *city on the hill*, bisa menjadi rujukan dari banyak pihak.

Tidak mudah memang, tapi kami pernah ke sana. 13.000 yang bekerja, tidak pernah henti sebelum tahun lalu mungkin, ya.

Sekarang sudah lebih dari 13.000 ya kali, Pak, ya?

Lebih, tetapi buat saya itu karya anak bangsa yang harus terus dijaga tantangannya pasti, tantangan alam pasti, tantangan masyarakat pasti, tetapi juga tantangan inovasi yang perlu terus ditajamkan sehingga investasi yang besar-besaran, APBN kita, dapat dipertanggungjawabkan termasuk memberikan *trickle down effect* bagi pertumbuhan ekonomi kita.

Kalau buat DKPP, mendukung sekali, terus Pak Ketua dijaga. Pemilu itu dasarnya *trust* dan *trust* paling besar itu ada pada penyelenggara dan partai politik sebetulnya.

Kemarin kami di tengah gonjang-ganjing yang kemarin ada catatan. Mudah-mudahan tidak ada catatan bagi penyelenggara Pemilu dan yang jaga penyelenggara pemilu adalah Teman-teman DKPP. Anggarannya naik 30%-an walaupun tetap di bawah 100 miliar, tapi kita bisa buktikan.

Sama dengan Teman-teman Ombudsman juga tidak besar, tetapi kita buktikan bukan anggaran yang membuat kontribusi besar, tapi komitmen, soliditas, dan militansi dari para pekerja atau pejuang di DKPP yang membuat Indonesia bisa jadi negara maju.

Itu, Pimpinan. Minimal sudah dicatat sama malaikat, saya sudah memberikan nasihat ini.

*Hadanallah waiyyakum ajma'in.  
Wallahul muwafiq illa aqwamith thoriq wala minkum,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II/F-PG):**

*Walaikumsalam.*

Kita juga mau Pak dicatat malaikat, jangan Pak Mardani saja.

Masih ada lagi, Pak? Cukup?

Baik. Silakan kalau masih ada yang mau ditanggapi. Kalau masukan saya kira catat saja, ya. Kalau misalnya tadi ada yang bertanya, silakan dijawab. Rasanya sih enggak ada, cuma Bu Munawaroh tadi ya, yang tanya, ya? Ke IPDN.

Pak? Oh ada? Silakan.

**F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A, M.H., M.IP., WAKIL KETUA  
KOMISI II):**

Terima kasih, Ketua. Mohon maaf saya telat.



Saya mau minta, ini kan dalam rangka untuk anggaran dan khusus kepada Mendagri, Kemendagri ya, *wabil khusus* terhadap BNPP bahwa Pagu Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran RKL-nya mengalami kenaikan sebesar 34 miliar 561, ya, lebih kurang 14,86%. Tentu ini prestasi yang luar biasa menurut kami.

*Nah*, yang ingin, kami ingin tahu, Komisi II ini, ya, ini kan disebutkan mewujudkan penegasan dan penetapan batas wilayah negara, ya? Ini ada apa? Kok masih mewujudkan penegasan dan penetapan batas wilayah negara? Apa memang belum, belum ada kepastian tentang penetapan batas wilayah negara, ya? Ini, Saudara Irjen Oji.

Yang kedua, ada berapa titik perbatasan yang dikelola? Sederhana, Pak. Itu kepada BNPP.

Kepada IPDN, kepada IPDN ini, disebutkan layanan pendidikan ke dinas IPDN dengan target 3.896 orang Praja, Pak Prof. Hadi, ya? Ini per-tahun, ya, per-tahun kelulusannya atau per-tahun penerimaannya?

Karena terakhir itu dari KemenPAN, kuota itu dikurangi, Pak, ya. Dari 1000 sekian menjadi 500, terus naik jadi 6, 700, saya lupa.

*Nah*, ini bagaimana? Apakah dari IPDN dengan infrastruktur yang ada sekarang ini Pak, ya, Jatinangor, di Kalimantan Barat, di Sulawesi itu kan sayang, Pak, kalau kuota itu diturunkan, sementara infrastruktur berdasar anggaran yang ada selama ini, ya, bisa percuma semua itu.

*Nah*, tolong nanti dijawab singkat saja, Pak, supaya kami juga bisa bicara dengan Kementerian PANRB mengenai ini supaya tidak sia-sia, Pak, yang sudah ada itu.

Demikian, Ketua. Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II/F-PG):**

Baik. Terima kasih, Pak Junimart.

Kami silakan, Pak.

**Pih. SEKRETARIS BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (IRJEN POL. MAKHRUZI RAHMAN, S.I.K., M.H.)**

Baik.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*  
Selamat pagi,  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
*Om swastiastu,*  
*Namo buddhaya,*

Saya langsung saja, Pimpinan.

Mengenai pertanyaan Pak Junimart Girsang, penegasan batas wilayah negara, memang ada beberapa batas wilayah negara yang belum tuntas sampai saat ini dengan negara Malaysia, dengan Timor Leste.

Untuk batas wilayah, ada beberapa segmen yang belum selesai kita ketahui bersama bahwa panjang batas wilayah RI-Malaysia dari mulai dari Kabupaten Sambas sampai ke Nunukan itu kurang lebih 2.062 KM dengan rincian ada beberapa sektor barat, kemudian ada sektor timur.

Kemudian, yang belum tuntas sampai saat ini kurang lebih batas Republik Indonesia dengan Malaysia itu berjumlah 20.329 pilar. Kemudian, pos Pamtas atau Pengamanan Terbatas berjumlah 78 pos dengan rincian:

1. Wilayah Kalimantan Barat itu sektor baratnya ada 24 pos. Kemudian, sektor timur itu ada 23 pos; kemudian
2. Ada di Kalimantan Timur, sektor baratnya ada 14 pos. Kemudian, sektor timurnya 17 pos.

Nah, OBP ini kurang lebih panjangnya 37.572 kilometer, kemudian OBP sektor timur 17,8 kilo. Jumlah pilar untuk yang, itu yang tadi Malaysia, Pak.

Kemudian, untuk yang Timur Leste ini tidak termasuk dalam wilayah ... (REKAMAN TIDAK JELAS) atau tidak termasuk dalam wilayah Kopan Kupang sedikit atau RDTL-nya Kupang ini.

Jadi, keseluruhannya adalah 268 kilometer terbagi antara lain sektor barat memiliki panjang 118 kilometer. Kemudian, di Kabupaten Kupangnya RDTL-nya itu 5 kilometer yang ada wilayah Timur Leste sedikit itu. Kemudian, sektor timur memiliki panjang 105 kilometer. Kemudian, terdiri dari Kabupaten Belu, Malaka, itu kira-kira belah pilarnya itu sebanyak 1180 ribu pilar. Jumlah pos pengamanan terbatasnya berjumlah 41 pos dengan rincian sektor Barat itu 16 pos, kemudian sektor timur 25 pos.

Inilah yang masih kita berusaha untuk menyelesaikan segmen antara negara Malaysia dengan negara Timor Leste. Untuk Papua tidak ada masalah, itu Bapak.

Kemudian, kita juga mengelola ada 15 pos lintas batas negara atau PLBN. Itu sekarang jumlahnya 15, Pak. Dua masih belum operasional karena memang kami butuhkan anggaran untuk pegawai yang mengelola di sana, yang tiga sudah, sudah aktif. Tiga ini terdiri:

1. 5 di Kalimantan Barat;
2. 4 di Kalimantan Utara;
3. 3 di Papua; dan
4. 4 di Timor Leste.

Demikian, Pak. Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II/F-PG):**

*Walaikumsalam warahmatullah.*

Silakan, Pak.

**REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (Dr. HADI  
PRABOWO, M.M.):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih, Bapak Pimpinan Komisi II dan terkhusus kepada Ibu Munawaroh.

Yang pertama, bahwa pelaksanaan Seleksi Calon Praja IPDN untuk Tahun 2024, ini terbagi dalam dua tahap. Yang pertama adalah Seleksi Kompetensi Dasar yang melaksanakan adalah BKN, Badan Kepegawaian Nasional. Setelah itu, yang meliputi tes kesehatan, psikologi, kesehatan tahap 2, kesamaptaan, IPDN bekerja sama dengan Mabes Polri, yaitu didasarkan atas MoU Menteri Dalam Negeri dan Kapolri. Kemudian, pelaksanaannya dilakukan oleh Biro Dalpres Mabes Polri yang bekerja sama dengan 34 Polda di seluruh Indonesia.

Adapun adanya pengaduan kemarin yang dari Pontianak, ini sudah dijelaskan, diluruskan oleh Bapak Kapolda dan didasarkan atas bukti-bukti bahwa Poli menganut sistem mekanisme BETAH yaitu Bersih, Akuntabel, Transparan, dan Humanis di mana setiap tahap ini sudah disampaikan pengumumannya.

Dan kemudian juga dilihat semuanya dan Anda tahu, kemarin sampai Pak Kapolda pun juga di Tiktok menyampaikan bahwa apa yang telah dilihat, dilakukan, ini sudah sesuai dengan objektivitas dan yang bersangkutan telah juga diberikan pemahaman.

Demikian, Ibu Munawaroh.

Kemudian, kepada Bapak Wakil Ketua yang kami hormati, Bapak Profesor Junimart, ini terkait dengan 3962 itu adalah posisi dari Praja saat ini ditambah dengan hasil SPCP Tahun 2024, 721. Kalau dilihat dari jumlah bangunan, kapasitasnya ini sebetulnya ada kurang lebih 5.000. Namun, seiring dengan pengurangan tahun 2023 menjadi 534 dan tahun ini 721, komposisinya 3.962.

Demikian, Bapak Wakil Ketua yang terhormat.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II/F-PG):**

*Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.*

Terima kasih.

**F-P. NASDEM (H. AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):**

Ketua.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II/F-PG):**

Silakan.

**F-P. NASDEM (H. AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):**

Tambahan, Ketua. Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Ketua, Pimpinan dan  
Anggota Komisi II,  
Pak Sekjen Mendagri, dan  
Seluruh jajaran dari IKN,  
DKPP, dan  
IPDN,**

Mungkin saya butuh penjelasan saja kaitan dengan dari Sekjen Mendagri. Di halaman 2, Pak. Sumber anggaran yang dari rupiah murni dan pinjaman luar negeri 1,5 triliun.

Di dalam huruf a dan b, di situ ada fasilitas pengelolaan sampah. Saya pernah mendapatkan informasi terkait dengan pengelolaan sampah itu, ada pengajuan dari kabupaten/kota pada daerah-daerah kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sebagainya. Apakah pinjaman luar negeri ini alokasinya nanti di sana?

**Pit. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI  
(KOMJEN. POL. Drs. TOMSI TOHIR, M.Si):**

Iya, benar.

**F-P. NASDEM (H. AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):**

Iya itu, itu poin yang pertama.

Yang kedua, di dalam halaman 7, di halaman 7, kaitan dengan ini karena kewenangannya Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Program Prioritas dan Prioritas Kementerian di situ tidak muncul kaitan dengan pengelolaan sampah. Ini butuh penjelasan saya kira.

Kalau yang lain, saya kira dari Dirjen-dirjen yang lain dari anggaran itu bakunya sudah ada penjelasan.

Saya kira itu, Pak Sekjen Mendagri.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II/F-PG):**

*Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Ada lagi?

Cukup, ya?

Silakan, Pak Sekjen.

**Pt. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI  
(KOMJEN. POL. Drs. TOMSI TOHIR, M.Si):**

Terima kasih.

Mohon izin untuk Pak Aminurokhman yang kami hormati, berkaitan dengan sumber pendanaan, ini pinjaman dari luar negeri yang dimaksud dari *World Bank*, Pak, berkaitan dengan program sampah. Kami dapat jelaskan bahwa ini adalah bagian daripada rencana untuk pengelolaan kurang lebih 30 kota, Pak, sampah.

Berkaitan mulai dari sosialisasi. Sampah itu kan ada beberapa jenis, Pak, antara lain sampah plastik yang masih bisa memiliki nilai jual, kemudian ada sampah-sampah lain yang tidak. Artinya yang betul-betul merupakan sampah yang harus kita atasi.

*Nah*, sosialisasi di daerah-daerah tersebut mulai dari rumah tangga untuk mulai memilah, Pak. Jadi, membudayakan kebiasaan daripada memilah sampah tersebut. Selanjutnya, melalui RT/RW kemudian dikumpulkanlah sampai ke bank sampah. *Nah*, di bank sampah ini nanti, ini yang kita harapkan bahwa sampah ini bisa diproses sehingga masih memiliki nilai, yaitu sebagai bahan bakar, Pak. Kayak briket-briket kecil seperti itu. *Nah*, harapannya dari program ini, 80% sampah bisa diatasi, 20%-nya itu tersisa sebagai debu, Pak.

Kemudian, pilihan kedua adalah ini berproses sebagai dibakar kemudian dijadikan tenaga listrik, Pak. Kalau tenaga listrik, tentunya PLN harus menyerap dan itu hanya bisa dilakukan di kota-kota besar yang sampahnya 1000 ton per hari. *Nah*, ini yang sampai sekarang masih terus menjadikan, apa namanya, perdebatan berkaitan dengan harga nilai jual ke PLN-nya, Pak.

Kemudian, ada khusus untuk DKI, sebagai contoh, itu TPV-nya yang dirasakan oleh Pak Pj. Gubernur, Pak Heru, terlalu besar sehingga program itu diubah.

*Nah*, dengan pembelajaran-pembelajaran itu maka kita mencoba untuk sampah yang besaran sampahnya 500 ton ke bawah per-hari di kota-kota yang umumnya di luar Jawa dan sebagian kota-kota di Jawa yang, di daerah maksudnya, di luar Jakarta itu, kita coba untuk bisa dilakukan proses yang terbaik tadi, Pak. Mulai daripada membangun budaya, mengelola sampah dari rumah tangga sampai dengan penyelesaiannya, Pak. Ini berkaitan dengan sampah dan diharapkan nanti 30 kota-kota besar di Indonesia itu bisa, ya, bisa terdapat budaya itu dan bisa mengatasi permasalahan utama terutama untuk kota-kota lah.

Kemudian yang kedua, sampah.

Oh, hanya satu, Pak. Iya.

Terima kasih, Pak.

**F-P. NASDEM (H. AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):**

Izin, Ketua.

Yang saya maksud begini, Pak. Di dalam ini anggaran pinjaman luar negeri ini, memang dijelaskan di situ untuk fasilitasi pengelolaan sampah oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah, tapi di dalam programnya sendiri, itu tidak, tidak muncul di situ yang berkaitan dengan sampah di situ, ada *stunting*, ada ini, ya korelasinya dana pinjaman ini.

Kalau yang dijelaskan Pak Sekjen tadi, kami bisa menangkap itu. Memang di kota-kota besar ada *problem* persoalan sampah sampai diolah menjadi tenaga listrik. Itu semua memang tidak mudah. Tapi maksud saya pinjaman luar negeri ini agar memberikan dampak sosial yang signifikan, program-program ini mengarah pada kepentingan publik, yang menurut saya ini harus lebih konkret, begitu Pak.

Di penjelasan di Dirjen Bina Pembangunan Desa itu tidak, tidak muncul, Pak, di situ anggarannya. Hanya di situ hanya *stunting*, tapi korelasinya dengan sampah ini tidak ada, begitu loh, Pak. Maksud saya begitu. Mohon penjelasan itu saja.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II/F-PG):**

Silakan, Pak.

**Pt. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI  
(KOMJEN. POL. Drs. TOMSI TOHIR, M.Si):**

Terima kasih, Pak.

Korelasinya antara program sampah tadi yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat bahwa dengan pemilahan sampah tadi di RT/RW itu sampai dengan desa atau kelurahan itu punya, punya tabungan, Pak. Punya tabungan dengan mengumpulkan sampah-sampah yang memiliki nilai, seperti botol atau plastik dan sebagainya.

*Nah*, dengan tabungan-tabungan yang ada di kelurahan-kelurahan ini, diharapkan dapat bergulir menjadi suatu program yang dapat mengatasi yang seperti contoh *stunting* dan lain sebagainya di lingkungan masing-masing, harapannya demikian mungkin, Pak.

Kemudian, berkaitan dengan bahwa di daerah-daerah tersebut dengan adanya program ini juga memerlukan tenaga kerja walaupun relatif kecil, Pak. *Nah*, ini juga berkaitan dengan program-program yang dimaksud tadi, namun untuk lebih rincinya dan lebih detailnya, kami akan mempersiapkan data-datanya, Bapak.

Demikian mungkin. Terima kasih, Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II/F-PG):**

Cukup, Pak Amin?

**F-P. NASDEM (H. AMINUROKHMAN, S.E., M.M.)**

Cukup.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II/F-PG):**

Ibu, silakan.

**F-PPP (Dra. Hj. MUNAWAROH):**

*Nah*, ini. Ini yang memang yang kita pertanyakan oleh Pak Amin itu adalah karena di sini ada program tadi untuk fasilitasi sampah tadi, tetapi di programnya ini *nyantol*-nya itu di mana? Begitu loh, Mas, karena enggak muncul, begitu.

Dan saya sejak kemarin pas konsinyering sudah sangat setuju dengan adanya program mitasi sampah ini karena seperti yang terjadi di Banyumas, itu

sangat menyerap tenaga kerja karena bisa dibuat *paving block*, kemudian untuk makanan ikan, *nah* itu, sehingga itu akan, apa, menambah ekonomi masyarakat dan daerahnya juga bersih, begitu lah.

Tetapi di sini enggak muncul, begitu loh, di program Dirjen ini di, di mananya itu *nyantol*-nya itu? Yang dipertanyakan kan itu. Karena ada anggarannya, tapi ketika dimasuk di program prioritas ini kok tidak ada.

Saya kira itu. Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II/F-PG):**

Silakan.

**Pjt. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI  
(KOMJEN. POL. Drs. TOMSI TOHIR, M.Si):**

Baik. Terima kasih, Bu.

Kami akan buat detailnya nanti secara tertulis sehingga bisa menyinkronkan untuk pemahamannya bersama, Bu.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II/F-PG):**

Cukup, ya?

Baik.

**F-P. DEMOKRAT (REZKA OKTOBERIA, S.H., M.H.)**

Pimpinan. Sedikit saja, bukan bertanya.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II/F-PG):**

Jadi, *ngapain*?

**F-P. DEMOKRAT (REZKA OKTOBERIA, S.H., M.H.)**

Dikasih enggak ini, Pimpinan?

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II/F-PG):**

Iya, mau *ngapain* dulu?

Silakan, silakan, silakan.



**F-P.DEMOKRAT (REZKA OKTOBERIA, S.H., M.H.):**

Terima kasih, Pimpinan.

Ini mungkin rapat kita terakhir, ya Pimpinan ya, dengan Mitra yang hadir hari ini dari Kemendagri, termasuk BNPP, IPDN, DKPP dan IKN. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran lembaga kementerian yang sudah berkenan hadir hari ini. Apresiasi untuk semua Mitra kami.

Pertama sekali saya ke DKPP. Pak, lanjutkan mana yang betul-betul melanggar dan sesuai dengan regulasi dan aturannya. Jangan sungkan-sungkan pemberhentian tetap. Terima kasih, Bapak tetap konsisten melangsungkan semua persidangan, bahkan sampai ke Indonesia Timur dan juga sudah selesai dan mau dilantik yang terpilih itu, tapi Bapak masih tetap melakukan persidangannya. Ini bukti DKPP harus berantas sampai selesai karena etikanya adalah modal dasar dari seluruh penyelenggara itu, Pak.

Saya sepakat tadi Bapak menyampaikan kegiatan sosialisasi, betul. Mungkin ke depan itu bisa direalisasikan, Pak. Dan berikut terkait anggaran. Walaupun permasalahannya banyak, anggarannya kurang, tapi saya yakin DKPP pasti bisa menyelesaikannya. Dan mudah-mudahan anggaran yang akan datang, bisa dialokasikan untuk DKPP yang ke depannya.

Sekali lagi, terima kasih untuk DKPP dan untuk, saya yakin pilkada serentak ini juga pasti akan ada temuan-temuan lainnya terkait penyelenggara ke depannya.

Selanjutnya, IKN. Pak Wakil, apresiasi satu kegiatan besar sudah terlaksana di IKN. Kami yang diundang mungkin terbatas tapi kami merasakan, merasakan bagaimana kemeriahan ataupun sakralnya acara di sana. Mudah-mudahan kami yang di Komisi II yang dari awal hadir di IKN suatu harinya nanti bisa bersama juga dengan Pak Wakil di IKN untuk melihat secara langsung ibu kota negara kita yang baru itu.

Sekali lagi, lanjutkan, Pak. Selesaikan semua permasalahan yang belum selesai. Selesaikan juga semua pembangunan yang memang untuk *support* kegiatan dan jalannya pemerintahan kita di ibu kota negara.

Saya dengar Bapak Presiden juga dalam waktu dekat akan kembali berkantor di IKN.

Betul ya, Pak Wakil?

Bahkan kemungkinan sampai Oktober di sana ya, Pak?

Jadi sekali lagi, sukses untuk IKN. Dan mudah-mudahan semua pembangunan bisa berjalan di tangan Bapak sebagai Wakil Kepala IKN bersama dengan Pak Ketua IKN.

Selanjutnya, terakhir untuk Kementerian Dalam Negeri. Untuk Pak Menteri dan Pak Tomsel selaku Plt Sekjen, apresiasi dari saya dan kami, Pak, terkait dengan konsistennya Kemendagri menjaga inflasi.

Saya tahu sekali Pak Menteri Tito dan Pak Tomsel sejak September 2022, kalau saya enggak salah di sana masih inflasi 6%, melakukan koordinasi komunikasi dengan semua kementerian dan lembaga, menjaga semua ini sehingga bisa turun, turun trennya sampai 2 sampai 3%, betul ya, Pak? Dan saya kalau enggak salah September ini 2,1% inflasinya.

Sekali lagi, apresiasi untuk Kementerian Dalam Negeri dengan seluruh jajarannya. Mudah-mudahan semua ini menjadi amal ibadah kita.

Terima kasih, Pimpinan. Termasuk untuk Pimpinan Ketua Komisi II beserta Wakil dan seluruh Bapak/Ibu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II/F-PG):**

Saya tahu kita mau *ngucapin*, dia minta kita *ucapin* ulang tahun partainya. Makanya dia begitu. Makanya dia kita kasih sur semua kita ini.

Terima kasih, Bu Rezka. Selamat ulang tahun buat Ibu dan Bapak di partai yang warnanya sama pakai baju Bu Rezka itu.

Pak Andi, silakan.

**F-P. GOLKAR (Ir. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, M.B.A.):**

Terima kasih, Pimpinan. Mohon maaf saya telat, Pimpinan.

Jadi ini agak menyimpang sedikit, Pimpinan, karena kebetulan ada Wakil Ketua IKN dan sekaligus Wakil Menteri ATR/BPN karena kita belum pernah rapat bersama antara Kemendagri dengan Menteri ATR/BPN, tapi kebetulan Pak Wamen ada, mudah-mudahan Pak Wamen selaku Wakil bisa menerima masukan kita ini, Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II/F-PG):**

Nanti sore ada Pak, Menterinya, Pak.

**F-P. GOLKAR (Ir. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, M.B.A.):**

Ya, tapi ini ada Pak Sekjen, Pak. Menyangkut RT/RW ini, Pak.

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II/F-PG):**

Oh, iya. Silakan, silakan.

**F-P. GOLKAR (Ir. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, M.B.A.):**

Terima kasih, Pak Sekjen.

Jawaban kemarin waktu kita konsinyering sudah saya baca dan terima kasih jawabannya.

Semangat saya ini, Pak, untuk bagaimana ATR/BPN dengan Kemendagri ini menyegerakan menyelesaikan RDTR, Pak, karena dalam konsinyering pun ATR/BPN juga mengajukan anggaran untuk pendampingan dan evaluasi substansi tentang RDTR, Pak.

Jadi ada berapa ratus itu di kabupaten/kota, 500 lebih saya rasa, target yang akan dicapai oleh ATR/BPN. Tapi sekali lagi seperti saya sampaikan waktu konsinyering, ini kalau enggak ada dorongan dari Kemendagri, Pak, itu kabupaten/kota itu pasti agak *slow*, Pak. Padahal ini sangat penting bagi kita, apalagi kita mulai maju pertumbuhan ekonomi dan mencapai indikator makro yang ditargetkan oleh Pemerintah, Pak.

Karena kemarin pun masih ada Kawan-kawan dari pengusaha yang jumpa saya, masih mengeluhkan RDTR belum selesai di berapa kabupaten, khususnya di dapil-dapil saya lah, Pak, dan juga dapil Pak Wamennya dulu. Jadi, ini mohon tetap, Pak, dorongan dari Kemendagri untuk mengajak kabupaten/kota itu untuk segera menyelesaikan RDTR, Pak, karena Pak Wamen juga sudah menganggarkan untuk itu, Pak.

Jadi, mungkin itu masukan dari saya dan ini sekaligus rapat terakhir bagi kami yang enggak duduk, Pak, ya. Jadi, rapat terakhir dan ini mungkin titipan lah, Pak, titipan untuk kita menyelesaikan RDTR ini, Pak.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.,  
KETUA KOMISI II/F-PG):**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih, Pak Andi Rahman.

Ada lagi?

Cukup, ya?

Silakan, Pak, kalau ada yang di yang mau ditanggapi.

Sebenarnya semuanya masuk masukan dan saran.

Cukup, ya?

Cukup, Pak?

Oke. Kalau sudah cukup, kita langsung masuk pada kesimpulan.

Coba tampilkan kesimpulannya.

1. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 sebesar Rp4.784.228.518.000,00 termasuk di dalamnya Pagu Anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Tahun 2025 sebesar Rp89.271.812.000,00 dengan pengalokasian anggaran per program sebagai berikut:
  - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp2.038.205.856.000,00;
  - b. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa sebesar Rp471.039.306.000,00;
  - c. Program Tata Kelola Kependudukan sebesar Rp2.119.117.603.000,00;
  - d. Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum sebesar Rp155.865.753.000,00.

Kalau bisa itu di hurufnya biar *double check*. Ya sambil jalan, ini kita setuju Pak, ya?

Bapak/Ibu cek dulu angkanya benar enggak? Jangan salah-salah nanti. Kalau salah nanti yang, kalau lebih enggak apa-apa untung, kalau kurang?

Sudah Pak, Pak Sekjen?

Sudah, ya? Setuju, Pak?

#### **(RAPAT: SETUJU)**

Oke, sambil jalan ya nanti diperbaiki itu, *eh, ditambahin*.

2. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Tahun 2025 sebesar Rp267.135.531.000,00 dengan pengalokasian anggaran per program sebagai berikut:
  - a. Program Dukungan Manajemen Rp233.632.179.000,00. Nanti sama ya di juga; kemudian
  - b. Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebesar Rp33.503.352.000,00.

Jadi, kalau membangun atau memperbaiki fasilitas perbatasan dia masuknya yang B ya, Pak?

Kecil sekali ya, 33 ya.

Iya, saya lupa tadi Pak ini, apa namanya, saya pernah menyampaikan aspirasi itu perbatasan kita di Keerom itu paling panjang ternyata, perbatasan itu. *Nah*, fasilitas yang paling bagus itu kan di Merauke, paling bawah. *Nah*, itu bolong-bolong, Pak. Makanya orang sering keluar masuk di situ. Kalau di Skouw yang di dekat Jayapura itu, itu sudah mulai bagus, tapi karena itu, panjang sekali, itu mungkin bisa jadi perhatian.

Dulu saya sudah pernah sampaikan itu waktu zaman Deputinya Pak Paulus Waterpauw. Saya enggak tahu apakah *diterusin* apa enggak itu, ada perbaikan di itu. Tapi nanti tolong menjadi perhatian tapi kalau angkanya cuman segini, ya bolong-bolong, Pak, perbatasan kita.

Ya ini, kenapa?

Iya, padahal kalau dilihat dari itu, itu enggak ada sama sekali. *Los* itu di sana itu, paling cuma dijaga teman TNI saja sama Polri.

Ya, mungkin ini kalau supaya pahala dari malaikat Pak Mardani dapat kita juga, ini pesan juga saya kira buat Pemerintah termasuk Kemendagri, untuk berikutnya saya kira perbatasan ini penting untuk diperhatikan, begitu, ya.

Setuju Pak, ya? ...(REKAMAN TIDAK JELAS).

**(RAPAT: SETUJU)**

3. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN Tahun 2025 sebesar Rp505.534.826.000,00 dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
  - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp368.441.452.000,00;
  - b. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp137.093.374.000,00.

Angkanya sudah cocok, Pak Sek? Sudah, ya? Setuju, ya?

4. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan OIKN sebesar Rp27.814.516.000.000,00 dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut serta menambahkannya ke dalam Pagu Anggaran, Pagu Alokasi Anggaran atau Pagu Definitif OIKN Tahun 2025 mulai pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.

Angkanya benar, Pak?

Kurang? Cukup? *Oke*, setuju?

**(RAPAT: SETUJU)**

Baik.

**Bapak/Ibu sekalian,**

Nanti *ditambahin* semua ya, apa namanya.

**Baik, Bapak/Ibu sekalian,**

Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan, maka rapat kerja atau rapat dengar pendapat ini sudah bisa kita akhiri.

Kami, sebelum saya tutup mengucapkan terima kasih kepada Saudara Plt. Sekjen Kemendagri beserta seluruh jajaran, juga yang mewakili Kepala BNPP seluruh dan seluruh jajaran. Terima kasih juga kepada Ketua DKPP dan seluruh jajaran. Terima kasih kepada Plt. Wakil Kepala OIKN beserta seluruh jajaran. Terima kasih juga kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Dengan mengucapkan *alhamdulillah rabbil alamin*, maka rapat ini saya nyatakan ditutup.

Terima kasih.

Selamat siang,  
Salam sejahtera buat kita semua,

*Billahi taufik wal hidayah.*  
*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.45 WIB)**

**a.n. KETUA RAPAT  
KABAG SET. KOMISI II DPR RI**



**Dahliya Bahnan, S.H., M.H.**  
**197504202002122002**